BAB I

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah salah satu unit kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja, kedua belah pihak harus mempunyai kesepakatan untuk dapat memajukan perusahaan agar memperoleh keuntungan yang besar. Pengusaha sebagai pemilik modal dan dana harus melaksanakan perusahaan secara efektif dan efisien, untuk dapat meningkatkan kelancaran, efektivitas dan efisiensi yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan maka harus memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, sebab pekerja sebagai pemilik tenaga dan daya selalu mengharapkan pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan minimum.

Sehingga dengan demikian antara keinginan pengusaha dan kebutuhan pekerja tertumpu pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut, maka upaya untuk memajukan perusahaan bukanlah hanya merupakan kewajiban pengusaha semata, akan tetapi juga merupakan kewajiban pekerja. Sebab semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar pula kesejahteraan yang diperoleh pengusaha dan pekerja.

Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan perusahaan bukanlah hanya dengan modal dan dana yang besar semata, akan tetapi hal yang penting pula untuk dapat diperhatikan adalah mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha dan pekerjanya. Sebab dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik maka tingkat perkembangan perusahaan lebih terjamin, walaupun disediakan

modal yang banyak akan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik, belum tentu akan diperoleh hasil yang baik.

Untuk dapat menjaga keserasian hubungan antara pengusaha dan pekerja maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang, sebab bila tidak demikian akan terjadi ketidak stabilan hubungan mereka yang dapat berakhir dengan terjadinya perselisihan perburuhan. Apabila perselisihan ini semakin besar dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka masalah ini akan diselesaikan melalui Panitia Penyelenggara Perselisihan Perburuhan (P4) sebagai wakil Pemerintah dari Tri partit yaitu Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja.

Apabila setelah dibawa kepada Panitia Penyelenggara Perselisihan Perburuhan juga belum dapat diselesaikan maka barulah dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal ini penulis berupaya untuk melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi penulis memilih objek penelitian di PT. Padasa Enam Utama Medan, yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pekerjanya.

Proses melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sampai saat ini undang-undang tersebut masih berlaku karena belum ada penggantinya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Sebelum penulis menguraikan materi skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis perlu menguraikan tentang pengertian dari beberapa kalimat yang terdapat

dalam Judul skripsi, agar setiap pembaca tidak salah dalam mengartikan dan menafsirkan materi yang dimaksud dalam judul tersebut.

Skripsi ini berjudul : *PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. PADASA ENAM UTAMA MEDAN KEBUN TELUK DALAM KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1964.*

Untuk dapat mengerti arti dari yang dimaksud dengan judul tersebut di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian dari istilah atau kata-kata yang ditemui dalam judul tersebut antara lain :

- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah istilah umum untuk pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja, baik oleh pihak majikan maupun oleh pihak buruh, baik secara perseorangan maupun secara massal.¹
- PT. Padasa Enam Utama adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, mempunyai kantor pusat di Jakarta dan memiliki kebun salah satunya di Teluk Dalam Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
- Kaitannya adalah mengandung pengertian sehubungan dengan²
- Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Payaman J. Simajuntak mengandung dua pengertian :
 - i. Pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi.

¹ Prof. Imam Soepomo, SH, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, disunting oleh Helena Poerwanto, SH dan Suliati Rachmat, SH, Djembatan, 1987, hal 193.

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1995, hal 203.